

BAB IV

PERANAN JENDERAL A. H. NASUTION

DALAM PERISTIWA 17 OKTOBER 1952

A. Memimpin Jalannya Demonstrasi

Pada Tanggal 17 Oktober 1952 A. H. Nasution dan para perwira lainnya mengorganisasi demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran parlemen (DPRS) untuk digantikan dengan parlemen (DPRS) yang baru.¹ Demonstrasi rakyat bergerak dari gedung DPRS di Jln. Wahidin I menuju ke Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden. Di hadapan para demonstan Presiden Soekarno menolak membubarkan parlemen dan menyatakan bahwa ia bukan diktator.

Saat bersamaan para panglima Angkatan Darat hadir dalam rapat di SUAD (Staf Umum Angkatan Darat). Ada sesuatu yang jadi pembicaraan intern di Angkatan Darat, yang kemudian disambung dengan yang disebut “Peristiwa 17 Oktober 1952”. Semua panglima Angkatan Darat sudah ada kecuali panglima TT-VI, Kolonel Sadikin yang sakit (Letnan Kolonel Gani yang mewakilinya).²

¹ Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), p.27

² A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.101-102

Suasana rapat pada saat itu cukup ramai karena ada nada protes terhadap politisi di parlemen. Sementara itu hasil rapat SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) yang ditetapkan para panglima Angkatan Darat memutuskan akan pergi ke Istana, dengan maksud menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan isi hati para Angkatan Darat seperti yang sudah dituangkan dalam pernyataannya yaitu agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen (DPRS) untuk digantikan dengan parlemen (DPRS) yang baru. Datanglah KSAP Kolonel Simatupang. Ia memberikan nasihat agar tetap tenang dan dalam usaha ini hendaknya bertemu dulu dengan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, meminta izin untuk bertemu dengan Presiden Soekarno.³

Setelah terlebih dahulu izin pada Menteri Pertahanan Hamengukubuwono IX, rombongan yang dipimpin KSAD A. H. Nasution langsung menemui Presiden Soekarno.⁴ Para panglima menghadap dan diterima oleh presiden yang terdiri dari KSAD Jenderal A. H. Nasution selaku pemimpin di dampingi KSAP Kolonel TB Simatupang beserta para Panglima TT dan pemimpin Angkatan Darat yaitu Kolonel M. Simbolon, Letkol Kosasih, Letkol M. Bahrn, Letkol Suwondo, Letkol Suprpto, Letkol A. Gani, Letkol Sutoko, Letkol Sukanda, Letkol Suryo Suyarso,

³ A. H. Nasution, *Bisikan Nurani Seorang Jenderal* (Bandung: Mizan Pustaka, 1997), p.386

⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.88

Letkol S. Parman, Letkol Azis Saleh, Letkol Sumantri, dan Kolonel A.E. Kawilarang.

KSAD Kolonel A. H. Nasution menjelaskan maksud kedatangan para perwira ini, ialah untuk menyampaikan hasil rapat SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) yang ditetapkan para panglima Angkatan Darat. Lalu ia menyerahkan pembicaraan selanjutnya kepada Letnan Kolonel Sutoko yang sudah disepakati jadi juru bicara.⁵

Sutoko menyampaikan bahwa Angkatan Darat berpendapat, bahaya bagi negara yang masih muda seperti Republik Indonesia ini, apabila tidak ada stabilitas politik di dalam negeri.⁶ Maka dimohonkan agar presiden sebagai panglima tertinggi juga mengakhiri cara bekerja parlemen yang selalu ikut campur dalam urusan militer dan membentuk DPR yang baru dalam waktu singkat dengan memerhatikan kehendak rakyat. Juga disinggung waktu itu tentang suatu mosi yang menurut pendapat Angkatan Darat telah memasuki lapangan eksekutif dan ini membahayakan bagi Angkatan Perang, karena dapat memperpolitik Angkatan Darat memngingat keadaan partai-partai pada masa itu.⁷

p.103 ⁵ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010),

p.104 ⁶ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010),

p.105 ⁷ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010),

Kemudian Kolonel Sutoko menyampaikan “Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat” yang tertulis, sebagai hasil rapat Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) dengan para panglima teritorium yang dilangsungkan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1952 dan ditandatangani oleh 16 orang perwira termasuk Kolonel Gatot Subroto yang tidak hadir dalam pertemuan dengan presiden di Jakarta memutuskan mengeluarkan pernyataan sebagai tertera di bawah ini:

1. Pimpinan Angkatan Darat memperhatikan perkembangan di sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang sekarang ini mengenai persoalan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
2. Cara beberapa anasir membicarakan soal-soal sekitar Angkatan Perang dengan membeberkan rahasia-rahasia Angkatan Perang untuk ditafsirkan dengan maksud-maksud yang destruktif, menunjukkan kecenderungan usaha pemecahan Angkatan Perang untuk memungkinkan pengangkatan-pengangkatan politik dalam Angkatan Perang. Cara-cara demikian itu akan membahayakan pula untuk dipakai pada lapangan-lapangan lain.
3. Melihat demikian itu yang dilakukan terhadap Angkatan Perang dan mungkin terhadap alat-alat negara lainnya adalah sangat berbahaya, karena akan mengakibatkan bahwa faktor-faktor kesukaan atau kebencian partai belakalah yang diutamakan di atas unsur-unsur kejujuran dan kecakapan.

4. Pernyataan-pernyataan rakyat yang berwujud tulisan-tulisan dalam surat-surat kabar, majalah-majalah dan secara individual maupun secara rombongan serta demonstrasi-demonstrasi, menguatkan kebenaran, bahwa cara bekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang sekarang ini mengandung bahaya bagi negara.
5. Demi keselamatan negara dan keutuhan Angkatan Perang, Pimpinan Angkatan Darat memutuskan:
 - a. Mendesak kepada Kepala Negara untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang sekarang ini dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam tempo yang singkat dengan memperhatikan kehendak rakyat.
 - b. Mengistirahatkan anasir-anasir di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang sekarang ini, yang cenderung seperti tersebut di atas dan mengambil tindakan terhadap pejabat-pejabat Angkatan Perang, yang menyalahi kewajiban penyimpangan rahasia-rahasia Angkatan Perang.
 - c. Melanjutkan pelaksanaan perbaikan Pimpinan Angkatan Perang dan penyempurnaan-penyempurnaan pertumbuhan Angkatan Perang.
 - d. Menjaga ketertiban umum untuk menghindari kekacauan.
6. Tidak akan ada suatu pemerintahan yang bagaimanapun juga coraknya dapat melaksanakan tugas untuk kepentingan negara, selama cara

bekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang sekarang ini tidak diakhiri.

7. Maka dengan tindakan-tindakan ini Pimpinan Angkatan Darat bermaksud memungkinkan bagi Pimpinan untuk melaksanakan tugasnya.⁸

Presiden Soekarno Angkat bicara menjawab dengan mengemukakan terlebih dahulu, bahwa ia memaklumi kesukaran-kesukaran yang Angkatan Darat hadapi. Ia memperingatkan supaya tentara jangan mau turut diombang-ambingkan oleh politik.

Presiden menjanjikan dalam tempo singkat akan membicarakan soal ini dengan pemerintah dan akan merundingkan supaya secepat mungkin akan diadakan Pemilu. Ia juga menyebutkan, bahwa suara-suara rakyat di luar Jakarta akan diperhatikan.⁹

B. Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952

Presiden menolak desakan pimpinan Angkatan Darat untuk membubarkan parlemen, kemudian disusul dengan penahanan dan pendaulatan Panglima Teritorium V Letnan Kolonel Suwondo di Malang dan Pendaulatan Panglima Teritorium VII Kolonel Gatot Subroto di

⁸ A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 3 Masa Pancaroba Pertama* (Jakarta: Haji Masagung, 1982), p.163

⁹ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.106

Makassar, dengan demikian gagal usaha TNI, sedangkan pihak parlemen bukan saja hanya menuntut pemecatan KSAD beserta panglima-panglima yang ikut berperanan, tapi juga agar Angkatan Darat dituntut ke pengadilan sebagai perwira yang melakukan “kudeta yang gagal”.¹⁰

Sesudah peristiwa 17 Oktober 1952, kedua pihak tidak mengambil suatu langkah yang berarti. Pemimpin-pemimpin tentara melanjutkan musyawarah mereka mengenai situasi, tetapi mencabut kembali semua pembatasan yang mereka berlakukan pada tanggal 17 Oktober. Parlemen menyetujui usul untuk mengadakan reses. Kabinet tetap pada pendiriannya, bahwa tidak terjadi apa-apa. Semua orang bersikap seolah-olah tidak ada krisis kabinet, walaupun pemerintah telah menderita kekalahan besar. Tetapi Soekarno mengancam, bahwa akan ada aksi balasan terhadap para “pemburu dalam tentara” itu, dan akan menepati janjinya itu. Dan tampaknya A. H. Nasution tidak dapat berbuat apa-apa, lebih-lebih lagi karena kabinet mengambil kebijaksanaan untuk berusaha melewati angin ribut yang ditimbulkan oleh peristiwa 17 Oktober itu, dan untuk bertahan terus dengan jalan mencegah terjadinya pergolakan yang besar dalam bidang pertahanan.¹¹

¹⁰ A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 3 Masa Pancaroba Pertama* (Jakarta: Haji Masagung, 1982), p.176

¹¹ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), p.130

Akan tetapi, musuh-musuh kabinet dan pimpinan tentara tidak membiarkan krisis berlalu begitu saja. Sikap kabinet dan A. H. Nasution yang tidak dapat berbuat apa-apa mendorong mereka untuk bertindak lebih lanjut. Namun posisi lawan-lawan pimpinan tentara menjadi cukup kuat untuk memungkinkan mereka menuntut kepada pemerintah agar mengambil tindakan terhadap para pimpinan tentara. Usaha-usaha kabinet untuk mengulur waktu dan memberi teguran lunak kepada pemimpin-pemimpin tentara atas perbuatan mereka yang tidak konstitusional itu tidak dapat memuaskan parlemen.¹²

Di tengah berbagai tekanan terhadap dirinya, A. H. Nasution ternyata telah mempersiapkan surat edaran yang berisi pernyataan kesediaan berhenti dari jabatannya. Tindakan itu dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawabnya atas terjadinya Peristiwa 17 Oktober, melainkan juga terhadap semua rentetan peristiwa 17 Oktober itu di daerah-daerah, misalnya di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Dengan disiapkannya pengumuman surat edaran itu dimaksudkan, supaya para bawahan Angkatan Darat jangan ragu-ragu lagi tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa 17 Oktober itu.¹³ Tapi Menhan Hamengkubuwono IX meminta A. H. Nasution untuk merahasiakan dahulu surat itu dan tidak

¹² Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), p.131

¹³ A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 3 Masa Pancaroba Pertama* (Jakarta: Haji Masagung, 1982), p.191

menyebarnya. Hal itu harus dilakukan sambil menunggu jalan “keluar” yang akan ditempuh pemerintah sesuai dengan kehendak dan aspirasi semua pihak, termasuk A. H. Nasution sendiri.

Indikasi ke arah persiapan penggantian KSAD oleh pemerintah telah dirasakan A. H. Nasution. Antara lain melalui “pendekatan” yang dilakukan Menteri Urusan Kepegawaian Suroso yang juga paman Kandung Ny. Nasution. Suroso dalam beberapa kesempatan menyampaikan pesan-pesan Perdana Menteri Wilopo tentang kemungkinan dijadikannya A. H. Nasution Staf Kedubes RI di Perancis. Juga tawaran untuk menjadi Staf Perdana Menteri Wilopo. Dalam pertemuan dengan Wilopo secara pribadi, perdana menteri itu menegaskan bahwa bagaimana pun KSAD adalah penanggung jawab peristiwa 17 Oktober 1952 itu. Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertahanan Sri Hamengkubuwono IX memanggil A. H. Nasution dan mengabarkan penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.¹⁴

Sikap A. H. Nasution yang bersedia untuk mengambil alih tanggung jawab atas peristiwa 17 Oktober 1952 itu memperoleh tanggapan positif dari para politisi sipil. Dr. Sukiman dari Masyumi menyatakan pujiannya atas

¹⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.91

sikap ksatria KSAD, dan demi rasa keadilan menuntut Menhan Hamengkubuwono IX untuk melakukan hal yang sama.¹⁵

Kegagalan manuver politik TNI juga disebabkan terpecahnya perwira dan pimpinan TNI. Barang kali inilah sebab pokoknya, mereka terpecah antara kelompok yang menginginkan TNI atas dasar profesionalisme dengan kelompok yang menentang profesionalisme. Bahkan dalam peristiwa itu sendiri, pimpinan dan perwira TNI yang berpaham profesionalisme merupakan pergerakan dari pada kejadian tersebut menunjukkan tidak adanya kesatuan arah. Sementara A. H. Nasution begitu antipati dan benci terhadap parlemen dan cenderung pada pandangan pemerintahan yang otoriter serta militeristis. Maka KSAP Jenderal Simatupang menentang pemerintahan diktator militer. Karena itu, para perwira yang mengikuti kedua tokoh TNI tersebut pada peristiwa itupun bertindak dalam keadaan “tujuan yang simpang siur”.

Pemerintah telah mempersiapkan pengganti A. H. Nasution yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Upacara serah terima dari A. H. Nasution kepada Bambang Sugeng dilakukan di MBAD (Markas Besar Angkatan Darat). Pada tanggal 5 Desember 1952, Kolonel A. H. Nasution dibebaskan oleh pemerintah dan berhenti sebagai KSAD, dan demikian pula beberapa perwira “pro-17 Oktober” lainnya mendapatkan sanksi yang sama. Pada

¹⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.92

tanggal 16 Desember 1952. Kolonel Bambang Sugeng seorang perwira dari bekas PETA yang pada saat menjelang terjadinya peristiwa itu dinonaktifkan oleh KSAD selaku Komandan Teritorium Jawa Timur, kini ditunjuk oleh pemerintah selaku KSAD mengganti kedudukan A. H. Nasution. Pengangkatan Bambang Sugeng ini rupanya mengandung prospek akan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan masalah itu selanjutnya terutama mengenai keutuhan Angkatan Darat, sebab antara Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX dengan KSAD Bambang Sugeng terdapat perbedaan yang besar di dalam menyelesaikan perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat.¹⁶

Tapi A. H. Nasution tidak dapat mengelakkan diri dari tuntutan hukum. Walaupun di kemudian hari, tuntutan hukum itu terhenti dan bahkan ia diangkat kembali sebagai KSAD. Walau begitu diberhentikan sebagai KSAD, ia menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Jaksa Agung dan Kepala Reserse Pusat. Dalam pemeriksaan terhadap dirinya, ia mengungkapkan rekonstruksi kejadian dan dialog sebenarnya di dalam Istana dengan Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai bantahan atas Dokumen BISAP yang beredar luas di masyarakat. “Dalam hal ada kudeta atau tidak, ia mengatakan bahwa tidak pernah diputuskan oleh KSAD atau

¹⁶ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), p.80

rapat KSAD agar panglima-panglima melakukan kudeta, dalam arti memaksa presiden dengan kekerasan”.

Demikian bagian penting isi dokumen BISAP tersebut yang merupakan fitnah belaka. Laporan BISAP ini ternyata disebarluaskan di semua teritorium dari partai-partai. Oleh orang-orang yang menerimanya dianggapnya sebagai “dokumen”, karena asalnya dari satu instansi resmi sedangkan dalam isinya justru bagian yang penting adalah tidak benar. Tidak ada dialog antara presiden dan KSAD dan tidak ada konsep yang disodorkan.¹⁷ “Yang benar ialah manuver dengan tekanan maksimal, baik dalam argumentasi maupun dengan mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang pro untuk menyatakan dukungan”.

Tentang penempatan meriam-meriam yang moncongnya dihadapkan ke Istana, ia menegaskan bahwa panser-panser polisi yang berjajar di depan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) harus dihadapi dengan meriam, karena AD tidak memiliki senjata lain yang tepat. Tadinya ditempatkan di lapangan Merdeka dan Banteng, tapi kemudian diarahkan ke Istana dan DPR. Tapi ada satu hal yang ditolak oleh A. H. Nasution yaitu tawaran PM Wilopo agar ia menduduki jabatan sipil. Ketika itu ia di tawari untuk bekerja sebagai pegawai sipil pemerintahan. Setelah melakukan perenungan atau kontemplasi ia mengatakan “Tidaklah soal berhenti sebagai

¹⁷ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.28

KSAD, tetapi berhenti dari TNI adalah soal lain. Pada usia 30-an saya masih cukup fanatik terhadap TNI yang begitu saya cintai sepenuh hati. TNI adalah kehidupan saya. Maka itu berhenti dari TNI tidak dapat diterima oleh hati dan pikiran saya”.¹⁸

C. Membentuk Partai Baru Bernama IPKI

Kajian A. H. Nasution terhadap permasalahan-permasalahan politik dan militer ternyata membawanya melangkah ke dunia politik. Ia ingin mendirikan suatu partai politik sebagai strategi baru “perjuangannya”. Ketika RUU Pemilu akhirnya disahkan menjadi UU oleh DPR pada tahun 1953, A. H. Nasution mengusahakan berdirinya suatu partai yang beranggotakan “bekas perjuangan bersenjata yang berasal dari regular TNI.

A. H. Nasution mencoba menghubungi dan mengumpulkan para perwira TNI dan pengusaha seperti, Mayor Suhardi, Maladi, Hidayat, Dr. Azis Saleh, Kolonel Gatot Subroto, Hasyim Ning, Uyeng Suwargana dan Komodor Suryono. Akhirnya A. H. Nasution dan kawan-kawannya dalam suatu pertemuan di Tugu, Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 1953 bersepakat mendirikan sebuah partai. Partai tersebut dinamakan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Program utama IPKI adalah “kembali ke jiwa dan semangat UUD 45”.

¹⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.92-93

Dalam pemungutan suara untuk DPRS, IPKI mendapatkan tiga kursi di daerah pemilihan Jawa Barat yang diisi oleh Letkol Daeng, Mayor Lucas Kustaryo dan Mayor Katamsi. Di Jawa Tengah IPKI mendapatkan satu kursi yang diisi oleh Kolonel Gatot Subroto, sedangkan A. H. Nasution terpilih untuk Dewan Konstituante dari daerah Jawa tengah.¹⁹

¹⁹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.96-97